

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Kinerja Pemprov Dinilai Baik

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/ Hal. 1

Edisi : Rabu, 25 April 2018

Kinerja Pemprov Dinilai Baik

BANDUNG, (PR).-

Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Masa Jabatan Gubernur dan LKPj Tahun 2017 mengapresiasi keberhasilan Pemprov Jawa Barat dalam berbagai kegiatan dan program. Meskipun demikian, pansus mencatat, ada beberapa hal yang harus diperbaiki.

"Pansus mendapat informasi yang kurang baik dan belum baik yang dijadikan catatan dan rekomendasi ke depan. Di antaranya persoalan kemiskinan yang masih tinggi sekitar 7,8% dan pengangguran yang juga tinggi di angka 8,9% dari penganggur potensial terbuka," ujar Ketua Pansus LKPj Gatot Tjahjono, Selasa (24/4/2018).

Menurut dia, sektor perizinan pun masih menyimpan banyak persoalan. Belum lagi masalah penegakan hukum di area kawasan lindung serta persoalan cetak sawah baru yang tidak terealisasi. "Lainnya, kualitas wirausaha belum sesuai dengan harapan. Penataan aset pun perlu terus ditingkatkan," katanya.

Gatot juga menyoroti Bandara Internasional Jawa Barat yang perlu dijaga dari pengelolaan pihak lain dan berpotensi merugikan Jabar. Oleh karena itu, peran BIJB sebagai badan usaha milik daerah perlu diperkuat.

"Selain itu, BJB yang baik, dengan aset mencapai Rp 110 triliun tahun ini harus dijaga CAR (rasio kecukupan modal) dan dikendalikan NPL (kredit bermasalah)-nya sehingga bisa masuk sepuluh besar bank di Indonesia. Isu negatif terkait dengan BJB Syariah sebagai anak perusahaan harus segera diselesaikan, termasuk BJB Tower yang masih bergulir di pengadilan," tuturnya.

Gatot menilai, BUMD yang baik dilihat dari kinerja, seperti BJB, PT Jasa Sarana, PT Hulu Migas, PT TGR, dan PT Jamkrida, harus dijaga. Bila perlu, ditambah pula modal untuk mereka karena ada tugas dan kepentingan Jabar, seperti terkait dengan jalan tol, persampahan regional, bandara,

pelabuhan laut, dan energi listrik yang perlu investasi jangka panjang.

"BUMD yang sudah telanjur tidak bisa berkembang semestinya dilikuidasi atau merger sehingga tak membebani pemprov ke depannya," ujarnya.

Pembenahan

Gubernur Ahmad Heryawan menegaskan, pihaknya terus berkomitmen untuk membenahi BUMD. Ke depan, pemerintah daerah harus memiliki orientasi pengawasan dan penyehatan BUMD.

"Sejak 2008, kami melakukan pembenahan. Sebagiannya sudah sehat, sebagian lagi masih dalam penyehatan," ujarnya se usai rapat kerja Pansus I terkait LKPj Tahun Anggaran 2017 dan LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat 2013-2018. Kegiatan itu dilangsungkan di ruang rapat Bamus DPRD Provinsi Jabar, Jalan

Diponegoro, Senin (23/4/2018).

Ia menuturkan, di dalam rapat kerja, juga muncul catatan tentang banyaknya tenaga kerja di BUMD. Hal itu tentu akan menjadi beban bagi BUMD itu.

Terkait dengan LKPj Tahun Anggaran 2017, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi capaian-capaian yang diraih Pemprov Jabar di bidang pembangunan infrastruktur dan kemasyarakatan. Dua di antaranya pencapaian catur sukses penyelenggaraan PON XIX Jabar 2016 dan pembangunan BIJB Kertajati.

"Di penghujung masa jabatan gubernur ini, masyarakat Jabar memperoleh kado terindah, yaitu akan diresmikannya BIJB Kertajati, Majalengka, yang insyaallah merupakan bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno Hatta," katanya.

Pawai

Pemerintah Provinsi Jabar

berhasil meraih penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha. Penghargaan akan diberikan kepada Gubernur Ahmad Heryawan pada momentum Hari Ulang Tahun Ke-22 Otonomi Daerah tingkat nasional di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/4/2018). Sebelumnya, Pemprov Jabar telah menerima 161 penghargaan dari pemerintah pusat dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian 6 kali berturut-turut.

Parasamya Purnakarya Nugraha merupakan tanda kehormatan yang diberikan atas karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Penghargaan itu sekaligus menjadi kado istimewa menjelang masa akhir jabatan Heryawan tahun ini.

Sekda Provinsi Jabar Iwa Karniwa mengatakan, penghargaan itu diberikan atas dasar hasil evaluasi kinerja penyeleng-

garan pemerintahan daerah Provinsi Jabar atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kurun waktu 2014-2016. Pemprov Jabar mencapai peringkat tiga besar berturut-turut secara nasional.

Sebagai wujud rasa syukur, pemprov berencana menggelar pawai, Kamis (26/4/2018). Pawai dimulai pada pukul 9.00, mengambil titik awal di Stasiun Kereta Api Bandung, Jalan Kebonkawung. Rombongan akan melintasi Jalan Pasirkaliki, Pajajaran, Cihampelas, Wastukan-cana, LLRE Martadinata, Ir H Djuanda, Sulanjana, Diponegoro, dan berakhir di Masjid Al-Muttaqin Gedung Sate.

"Berkenaan dengan pelaksanaan kirab/pawai, akan dilakukan pengaturan lalu lintas di jalur-jalur yang dilalui. Apabila berdampak terhadap kemandirian, Pemprov Jabar menyampaikan permohonan maaf," tuturnya. "Dimohon kiranya masyarakat yang beraktivitas dan melalui ruas jalan tersebut dapat menyesuaikan." (No-vianti Nurulliah)***